



## **PANDEMI COVID - 19, DISRUPSI BONUS DEMOGRAFI**

### **DAN KETAHANAN NASIONAL**

#### ***Covid -19 Pandemic, Disruption of Demographic Bonus and National Resilience***

TITIK HANDAYANI PANTJORO

Yayasan Bhakti Bangsa, [titikhantjoro@gmail.com](mailto:titikhantjoro@gmail.com), Hp : 0811933034

**ABSTRAK.** Indonesia saat ini mempunyai peluang besar untuk meraih “bonus demografi”, yaitu keuntungan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia produktif. Berdasar proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, puncak bonus demografi akan berlangsung pada 2021-2022, dengan angka ketergantungan mencapai titik terendah yaitu 45,4. Namun adanya pandemi COVID-19 telah merubah peluang menjadi disrupsi bahkan ancaman. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis dampak pandemic COVID-19 terhadap peluang bonus demografi serta ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, berdasarkan data sekunder serta kajian literatur. Data kuantitatif bersumber dari BPS, Bappenas, Apindo, Lemhannas serta hasil survei beberapa lembaga penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pandemic COVID-19 berdampak signifikan terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran termasuk perempuan yang termarginalisasi dan meningkatnya kemiskinan. Kondisi ini menyebabkan disrupsi terhadap berbagai upaya pemenuhan prasyarat meraih bonus demografi, diantaranya kesempatan kerja layak, masuknya perempuan dalam pasar kerja dan meningkatnya tabungan masyarakat. Pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap ketahanan nasional, nilai dan kategori indeks ketahanan nasional turun dari kategori “cukup tangguh” menjadi kategori “cukup tangguh menjelang kurang tangguh”. Untuk itu, kebijakan pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan pengendalian pandemi COVID-19 harus dilakukan secara terintegrasi, sinergi antarpemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, lintas sektor, dunia Usaha dan industri serta didukung oleh kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kata kunci: Pandemi COVID-19, Bonus demografi dan Ketahanan Nasional.

**ABSTRACT** Indonesia currently has a great opportunity to achieve the "demographic bonus", an advantage of achieving high economic growth due to the large number of the population of productive age. Based on the 2015-2045 Indonesian population projection, the peak of the demographic bonus will take place in 2021-2022, with the dependency figure reaching the lowest point of 45.4. However, the COVID-19 pandemic has turned opportunities into disruption and even threats. This study aims to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on opportunities for demographic bonuses and national resilience. The method used is descriptive analytical, based on secondary data and literature review. Quantitative data comes from BPS, Bappenas, Apindo, Lemhanas as well as survey results from several research institutions. The results of the study show that the COVID-19 pandemic has a significant impact on decreasing economic growth, increasing unemployment including marginalized women and increasing poverty. This condition has resulted in disruption of various efforts to fulfill the preconditions for gaining a demographic bonus, including decent work opportunities, entry of women into the labor market and increased public savings. The COVID-19 pandemic also affects national resilience, the value and category of the national resilience index has dropped from the category "tough enough" to the category "tough enough before less resilient". For this reason, policies for national economic recovery in line with the control of the COVID-19 pandemic must be carried out in a manner integrated, synergy between stakeholders, central and regional governments, across sectors, business and industry and supported by community discipline in implementing health protocols.

Keywords: Pandemic COVID-19, Demographic Bonus and National Resilience



## PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, dunia, termasuk Indonesia telah dihadapkan pada bencana wabah Corona Virus Disease 2019, atau dikenal dengan COVID-19, dan pada pertengahan Maret 2020 WHO menetapkan wabah tersebut sebagai pandemi global dan menjadi musibah dunia. Data per 28 Agustus 2020, 24,650,487 jiwa kasus terkonfirmasi. 836,049 kematian di seluruh dunia. Sedangkan untuk Indonesia, jumlah kasus terpapar virus sebanyak 165,887 orang dengan jumlah kematian 7.169 orang (Worldometers.info). Sebagai bencana non-alam di bidang kesehatan yang sangat masif, dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini bersifat multidimensional. Dalam konteks ketahanan nasional, terdapat delapan aspek atau *asta gatra* yang juga menghadapi dampak akibat pandemic COVID-19. Kesehatan masyarakat sebagai bagian dari variabel demografi yaitu morbiditas dan mortalitas mengalami guncangan akibat pandemic COVID-19. Pandemi juga berdampak terhadap *gatra* lainnya, diantaranya adalah *gatra* ekonomi, karena wabah tersebut sudah mempengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Guncangan terhadap perekonomian yang dipicu oleh pandemi COVID-19, selanjutnya berdampak terhadap situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah untuk meredam penyebaran virus berimplikasi pada terhentinya kegiatan baik sosial maupun ekonomi masyarakat untuk sementara waktu. Terhentinya aktivitas produksi berimplikasi pada menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari sisi pelaku usaha, kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kapasitas finansial perusahaan dan berimbas pada langkah dirumahkannya sebagian besar karyawan dan bahkan pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Disamping itu juga terdapat pekerja di sektor jasa pariwisata, perdagangan dan pekerja sektor informal yang mengurangi aktivitasnya, bahkan terpaksa mengganggu. Demikian pula pekerja migran dari beberapa negara yang dipulangkan akibat pandemic COVID-19 juga semakin menambah gelombang pengangguran baru.

Permasalahan pengangguran, merupakan bagian dari permasalahan dalam *gatra* demografi (keadaan dan kemampuan/kualitas penduduk) sebagai bagian dari aspek alamiah atau *Trigatra*. Selain itu, pengangguran, karena terkait dengan kesempatan kerja, juga merupakan variabel dari *gatra* ekonomi sebagai bagian dari *panca gatra*. Dampak pandemic COVID-19 terhadap *gatra* demografi dan *gatra* ekonomi membawa persoalan yang cukup berat. Hal itu berkaitan dengan fenomena adanya peluang *memetik bonus demografi*. Berdasarkan Proyeksi



Penduduk Indonesia 2015-2045, bahwa puncak bonus demografi akan berlangsung pada tahun 2021-2022, di mana Indonesia mempunyai rasio ketergantungan pada titik terendah yaitu 45,4, yang berarti 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) hanya menanggung kurang dari separuhnya (45,4 orang penduduk usia non produktif yaitu anak-anak (<15 tahun) dan lansia (>65 tahun). Secara nasional, Indonesia telah memasuki era bonus demografi sejak 2012 dan diprediksi berakhir tahun 2037 (Bappenas, BPS dan UNFPA, 2018). Bonus demografi adalah periode saat tanggungan 100 penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif suatu negara dibawah 50. Artinya, 100 penduduk produktif hanya menanggung beban kurang dari 50 orang.

Namun untuk mencapai bonus demografi (BD) tentu harus disertai beberapa prasyarat, diantaranya adalah sumber daya manusia yang berkualitas, lapangan kerja yang layak, masuknya perempuan di pasar kerja dan besarnya tabungan masyarakat. Sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah sudah mencanangkan kebijakan membangun SDM unggul untuk memanfaatkan peluang bonus demografi dan menjadi lompatan kemajuan yang sekaligus menyongsong Indonesia Emas pada

tahun 2045. Adanya pandemic COVID-19, maka berbagai kebijakan yang ada menjadi terganggu. Besarnya jumlah penganggur termasuk penganggur dari kalangan penduduk usia muda dan perempuan berpotensi mematahkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, sehingga terjadi disrupsi dalam memenuhi prasyarat untuk meraih bonus demografi, bahkan ancaman menjadi bencana demografi. Penduduk usia produktif yang diharapkan dapat menanggung penduduk usia non produktif, tidak dapat menjalankan fungsi ekonominya. Perempuan yang diharapkan dapat masuk ke pasar kerja dan memberi kontribusi bagi ekonomi keluarga justru ikut terdampak pandemic COVID-19 sebagai kelompok yang rentan kehilangan pekerjaan, dan atau berkurang pendapatannya. Kondisi kondisi tersebut akan menyebabkan gagalnya prasyarat lain dari pemenuhan bonus demografi yaitu adanya tabungan masyarakat.

Kajian ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan serta pengaruhnya terhadap pemanfaatan peluang bonus



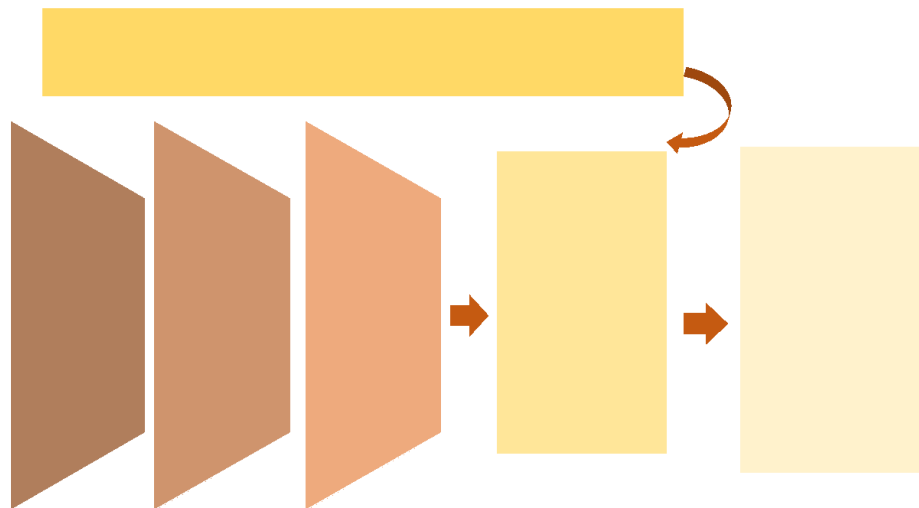
demografi dan ketahanan nasional. Analisis ini penting untuk diangkat, mengingat bahwa pada tahun depan (2021-2022), secara demografis Indonesia berada pada titik puncak mempunyai rasio ketergantungan terendah Artinya pada tahun ini merupakan masa strategis dan Indonesia seharusnya sudah bersiap-siap memasuki peluang dan potensi besar memperoleh demografi deviden yang lebih besar. Di samping itu, pada periode ini jumlah penduduk usia sekolah (15 – 24 tahun) jumlahnya cukup besar, dan pada saat Indonesia genap berusia emas (100 tahun) di tahun 2045, kelompok tersebut akan menjadi tulang punggung usia produktif terbesardi Asia Tenggara yaitu mencapai 41 persen. Kondisi itu merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan, tetapi sekaligus juga tantangan berat dengan segala permasalahannya termasuk masalah kualitas

penduduk yang belum menggembirakan. Adanya pandemi COVID-19, semakin memperparah kondisi ini.

## **METODE**

Kajian ini, merupakan kajian literatur dan menggunakan data sekunder yang relevan. Data kuantitatif tentang pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Tenaga Kerja, Bappenas, BPJS–Ketenagakerjaan dan beberapa hasil penelitian dari Lembaga penelitian seperti LIPI, Lembaga Demografi- FEB -Universitas Indonesia, Lembaga penelitian Semeru dan Indef, Apindo , Lemhanas, ILO dan Bank Dunia. serta data data yang berasal dari media masa.

Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan hubungan antarvariabel sebagaimana deskripsi yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka. Hubungan antarvariabel dapat digambarkan dan dikembangkan dalam kerangka berpikir pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir Hubungan Antarvariabel

## HASIL

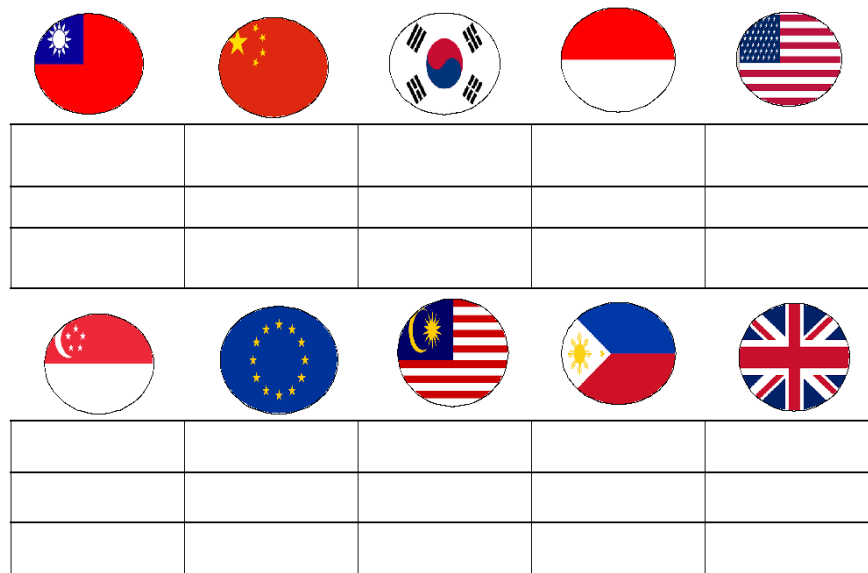
### Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian dan Kemiskinan

Adanya kebijakan untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 yang lebih luas, maka pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan *physical distancing*. Meskipun kebijakan PSBB dianggap lebih moderat dibanding dengan kebijakan “lockdown” seperti yang dilakukan oleh beberapa Negara. Namun kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya aktivitas dunia usaha dan aktivitas masyarakat secara signifikan. Secara makro dan pada tataran global, pertumbuhan ekonomi dunia juga diprediksi turun bahkan negatif. Dana

Moneter Internasional (IMF) menilai pandemi COVID-19 telah mengubah kondisi perekonomian global. Hanya dalam kurun tiga bulan, proyeksi ekonomi berubah total, dan seluruh negara di dunia telah masuk ke dalam krisis. Selama satu semester ini, IMF harus tiga kali mengubah proyeksinya. Pada Januari, IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 3,3%. Dan pada April 2020, menurunkan proyeksinya menjadi minus 3%, yang diubah lagi menjadi minus 4,9% pada Juni. Dengan proyeksi tersebut, IMF memperkirakan total kerugian ekonomi global selama dua tahun (2020-2021) mencapai 12 triliun dolar akibat krisis. Perubahan-perubahan proyeksi itu menegaskan bahwa dampak pandemi terhadap perekonomian lebih luas dari

perkiraan semula. Demikian pula, sebagaimana dikemukakan dalam *Global Economic Prospects* yang dirilis Bank Dunia pada Juni 2020, diperkirakan bahwa ekonomi dunia akan menyusut 5,2 persen pada tahun ini. Ini berarti merupakan resesi terdalam sejak Perang Dunia II (Bank dunia, 2020).

Menurunnya kinerja perekonomian, juga terkait dengan pilihan kebijakan dari tiap negara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Data dalam Gambar 2 menunjukkan hubungan signifikan antara kebijakan dengan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Memutus Penyebaran Covid-19 di Beberapa Negara, Triwulan I 2020

Pada triwulan I, 2020, Indonesia masih mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi disbanding dengan negara negara lain, apalagi yang menerapkan kebijakan "Lockdown". Sementara itu, berdasarkan data BPS, (2020), bahwa pada triwulan I-2020 terhadap triwulan I

2019 tumbuh sebesar 2,97 persen (y-on- y), melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,07 persen. Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada triwulan II 2020, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (y-on-y). Dari sisi produksi,

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen (BPS, 2020). Adanya pertumbuhan ekonomi yang negative pada Triwulan ke dua di Indonesia, menunjukkan bahwa dampak pandemic COVID-19 mulai dirasakan, bahkan dikhawatirkan oleh berbagai pihak akan mengalami resesi seperti yang tela dialami oleh beberapa negara tetangga seperti Singapura. Adanya pandemic global, yang berdampak pada krisis perekonomian global

juga menyebabkan *supply shock* bagi manufaktur global karena banyak pabrik dalam jalinan mata-rantai pasokan dunia menghentikan aktivitas produksi. (Basri,2020). Saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar pada periode berikutnya tidak mengalami kontraksi yang berujung pada resesi.

Dampak pandemic COVID-19 terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi bahkan menimbulkan resesi di beberapa negara, juga berdampak riil terhadap dunia usaha. Berdasarkan kondisi sektoral, perhotelan, pariwisata dan transportasi merupakan sektor yang terdampak cukup signifikan sebagaimana deskripsi dalam Tabel 1 ,2 dan 3.

**Tabel 1.**  
**Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Perhotelan dan Pariwisata:**

NO	DAMPAK
1.	Lebih dari 2000 hotel dan 8000 restoran tutup dengan potensi hilang pendapatan antara Januari – April 2020, sebesar 30 T untuk sektor Hotel dan 40 T untuk restoran.
2.	Kerugian maskapai penerbangan US\$ 612 juta
3.	Kerugian Tur Operator Rp.4 T
4.	Pekerja sector pariwisata 90% dirumahkan dari jumlah pekerja pariwisata 13 juta orang

**Tabel 2.**  
**Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Riil**

NO	DAMPAK
1.	Sektor TPT, utilisasi hanya 30% dan 1.889.852 pekerja sudah di rumahkan dan PHK.
2.	Sektor Retail Non Makanan-Minuman, kemampuan cash flow hanya bisa bertahan hingga Juni karena omset turun sampai 90%
3.	Sektor Alas Kaki, mulai pertengahan bulan Mei 2020 pasar orientasi ekspor mengalami penyusutan, sementara sepinya pasar retail domestik berakibat tertundanya pembayaran pada industri nasional. produksi turun 70%, bahkan salah satu pabrik terbesar sudah PHK 12.000 Pekerja dan menutup salah satu pabriknya. Secara keseluruhan sekitar 500.000 pekerja sudah dirumahkan dan PHK
4.	Transportasi Darat (ORGANDA), aktivitas bisnis turun 90%, sekitar 1 juta pekerja dirumahkan.



5. Transportasi Udara (INACA), sejak dikeluarkannya Permenhub PM 25/2020 maka 24 April hingga 1 Juni 2020 tidak ada pesawat yang boleh beroperasi, kondisi ini sangat memukul sektor perhubungan udara

**Tabel 3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Otomotif dan Makanan Minuman**

NO	DAMPAK
1.	Sektor Otomotif, Penurunan penjualan mobil pada bulan Mei 2020 hingga 95%. Penjualan tercatat hanya 3.551 unit turun jauh dari penjualan bulan Mei 2019 sebesar 84.109 unit
2.	Sektor Makanan dan Minuman, turunnya konsumsi dan melemahnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari tutupnya pusat perbelanjaan dan grosir. Sektor MAMIN diprediksi hanya akan tumbuh 5%. Adapun hasil survei internal yang dilakukan terhadap anggota GAPMMI memperkirakan penjualan makanan olahan turun 30%. Pabrik terdampak pada sisi operasional dan logistik akibat adanya pembatasan sosial dari pemerintah lokal. Lebih dari itu untuk penjualan melalui non-pasar modern yang sekitar 70% kontribusinya, menurun sangat tajam. Pekerja sudah dirumahkan dengan pembayaran gaji 50%

Sumber: Apindo, 2020.

Hasil kajian Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Kemenaker dan LD-FEB UI juga menunjukkan bahwa dari kelompok pengusaha, cukup besar yang menyatakan kegiatan usahanya terhenti (40 %), dan 57 % menyatakan usaha masih berjalan tetapi produksi dan pendapatan berurang. (LIPI, Kemenaker, LD-FEB-UI, 2020). Kondisi riil sebagaimana dikemukakan, tentu berimplikasi terhadap ketenagakerjaan yaitu meningkatnya penganggur maupun pekerja yang mempunyai penghasilan yang menurun. Dampak lanjutan dari menurunnya kinerja perekonomian secara makro, serta lesunya dunia usaha, pada tataran mikro di tingkat rumah tangga juga menurunkan daya beli dan kemiskinan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin

sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019., sehingga jumlah penduduk miskin saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang. Dilihat dari persentase, untuk persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 poin persentase terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 poin persentase terhadap Maret 2019. Sementara itu, prediksi yang dilakukan oleh Suharyadi dkk (2020) menghasilkan estimasi dampak COVID-19 terhadap kemiskinan di Indonesia. Salah satu proyeksi dalam kajian tersebut adalah bahwa dampak paling ringan COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tingkat kemiskinan dari 9,2% pada September 2019 ke 9,7% pada akhir 2020. Hal ini berarti bahwa akan ada 1,3 juta orang yang jatuh miskin. Akan tetapi, proyeksi



terburuk dari kajian tersebut, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan akan melonjak cukup tajam menjadi 12,4%. Hal itu menyiratkan bahwa 8,5 juta orang akan menjadi miskin. Proyeksi terburuk ini berarti bahwa kemajuan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan selama satu dekade terakhir akan sia-sia. Implikasinya adalah bahwa Indonesia perlu memperluas program perlindungan sosialnya untuk membantu kaum miskin, baik yang baru maupun yang telah ada sebelumnya.

### **Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ketenagakerjaan**

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Februari 2020, sebelum muncul kasus COVID-19 di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yaitu sebanyak 6,88 juta atau 5,01 persen, dan pada Februari 2020 turun menjadi 7,50 juta atau 4,99 persen berstatus penganggur. Bahkan tingkat pengangguran terbuka pada awal tahun 2020 itu merupakan angka terendah dalam 20 tahun terakhir.

Munculnya wabah COVID-19 telah meningkatkan jumlah dan proporsi penganggur cukup signifikan. Berbagai prediksi dan asumsi meningkatnya jumlah penganggur akibat pandemic COVID-19 cukup beragam. Prediksi

awal, sekitar akhir bulan April *Center of Reforms on Economic* – Indonesia (CORE Indonesia) memperkirakan peningkatan jumlah penganggur terbuka pada triwulan II 2020 dalam tiga skenario. Potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta orang dengan skenario ringan, 6,68 juta orang dengan skenario sedang, dan bahkan hingga 9,35 juta orang dengan skenario berat. Penambahan jumlah pengangguran terbuka terjadi terutama di pulau Jawa, yaitu mencapai 3,4 juta orang dengan skenario ringan, 5,06 juta orang dengan skenario sedang dan 6,94 juta orang dengan skenario berat. Tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada triwulan II 2020 diperkirakan mencapai 8,2 persen dengan skenario ringan, 9,79 persen dengan skenario sedang dan 11,47 persen dengan skenario berat. Jumlah pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (yang menurut proyeksi CORE Indonesia akan berkisar -2,00 persen hingga 2,00 persen pada tahun 2020), melainkan juga disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala Penambahan besar (Core-Indonesia, 2020).

Selanjutnya berdasarkan hasil survei

kolaborasi antara Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Puslitbang Ketenagakerjaan Kemenaker dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dilakukan secara daring tentang “Dampak Darurat Virus Corona Terhadap Tenaga Kerja Indonesia” pada akhir April sampai awal Mei terhadap 2160 responden, menunjukkan temuan bahwa pada kelompok pekerja, terdapat sekitar 16 persen yang terkena PHK, dan sekitar 14 persen diantaranya adalah PHK tanpa pesangon. Dilihat dari kelompok umur, proporsi terbesar yang terkena PHK berusia 15-19 tahun (62,7 persen). Disamping itu, prediksi pengangguran yang berasal dari kelompok pekerja yang berstatus berusaha sendiri berdasarkan data Sakernas 2019 sebanyak 26 juta, diperkirakan akan muncul 10 juta pekerja yang berhenti bekerja, 10 juta pekerja lainnya hanya akan bergantung pada pendapatan yang telah mengalami penurunan hingga 40% lebih. Apabila 2 bulan ke depan, bila pandemi masih terjadi (sampai bulan Juli), maka 10 juta pekerja mandiri ini akan kesulitan pekerjaan dan sekaligus kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Demikian pula, pada mereka yang berstatus pekerja bebas/pekerja keluarga yang menurut data Sakernas 2019 berjumlah

26,5 persen, dengan adanya pandemic COVID-19, 15 juta diantaranya akan menganggur. Artinya dari kelompok pekerja yang berstatus usaha mandiri dan pekerja bebas, akan terdapat 25 juta penganggur akibat pandemic COVID-19. (LIPI, Kemenaker, LD-FEB-UI, 2020).

Estimasi peningkatan pengangguran juga dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU. Yang melakukan kajian Dampak COVID-19 pada Ketenagakerjaan, dengan data yang lebih makro menghasilkan estimasi bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2020 akan naik berkisar antara 6,17% (batas bawah) sampai 6,65 % (batas atas). Dilihat dari sisi pengurangan penyerapan tenaga kerja berkisar antara 1.623.200 (batas bawah) sampai 2.285.100 (batas atas). Jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja terbesar berasal dari sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa (Adi dkk, 2020).

Prediksi jumlah penganggur sebagaimana hasil kajian dari akademisi dan peneliti, serta data empiris dari para pelaku usaha sebagaimana telah dikemukakan, cenderung akan berbeda dengan data yang tercatat pada Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan berikut:

Tabel 4.  
Potret Tenaga Kerja Terdampak Pandemi COVID-19



No	Uraian	Jumlah	% Terdampak Total
1	Pekerja Formal Dirumahkan	1.034.618	34,14 %
2	Pekerja Formal Ter PHK	377.386	12,45 %
3	Pekerja Informal Terdampak	316.501	10,44 %
4	Pekerja Formal dan Informal Terdampak (A)*	1.728.505	57,03 %
5	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)**	34.179	1,12 %
6	Pemulangan pemagangan	465	0,02 %
7	CPMI + Pemulangan pemagangan (B)	34.644	1,14 %
8	Pekerja Terdampak *** ( C )	5.547	0,18 %
9	Pekerja terdampak - tidak lengkap data **** ( D )	1.262.257	411,65 %
	TOTAL A + B + C + D	3.030.953	100.00 %

Keterangan:

\*) Merupakan penjumlahan data cleansing Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. \*\*) Terdapat 1,2 juta data yg masih dlm konfirmasi ulang krn belum memenuhi kesesuaian NIK serta masih terdapat duplikasi NIK.

\*\*\*) Dari 836.774 data clean Kemnaker, terdapat irisan data sebesar 32.907 yang terdaftar pada BP Jamsostek

Sumber: Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan, dalam Apindo (2020).

Perbedaan data jumlah penganggur baru sebagai dampak pandemic COVID-19 dapat dimengerti karena adanya perbedaan metode, asumsi, sumber data serta periode waktu prediksi. Sementara data penganggur yang tercatat juga cenderung lebih kecil karena, kemungkinan terjadi semacam “phenomena gunung es”, dalam kasus jumlah pengangguran.

Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia selain peningkatan angka pengangguran juga berpengaruh pada kondisi pasar tenaga kerja. Upaya untuk mengatasi peningkatan jumlah pengangguran ini menghadapi tantangan besar karena selain adanya penganggur lama, juga ditambah masuknya angkatan kerja baru yang baru lulus dari jenjang Pendidikan SMA/SMK sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi serta lulusan dari perguruan tinggi. Di samping itu, penyerapan kembali tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Tantangan lain adalah bahwa lanskap ketenagakerjaan ke depan akan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi dan menuntut sistem hubungan kerja yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan ini. Strategi yang dimaksud

adalah, antara lain, penyediaan dukungan untuk relaksasi biaya operasi perusahaan, pelatihan tenaga kerja yang berkelanjutan, peninjauan peraturan ketenagakerjaan untuk mendorong fleksibilitas di pasar tenaga kerja, dan pengupayaan peningkatan produktivitas sektor informal.

### **Pandemi COVID-19 dan Bonus Demografi**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa beberapa prasyarat untuk memetic bonus demografi, bukan hanya sekedar jumlah penduduk usia produktif yang besar. Akan tetapi memerlukan beberapa prasyarat. Merujuk prasyarat yang dikemukakan oleh Bloom (2003) bahwa untuk mencapai kondisi bonus demografi adalah 1)Meningkatnya jumlah tenaga kerja, 2) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia,3) Ketersediaan lapangan/kesempatan kerja, 4) Meningkatnya perempuan dalam pasar kerja, serta 5) Meningkatnya tabungan masyarakat.

Prasyarat pertama sudah terpenuhi dengan adanya rasio ketergantungan yang rendah, akibat besarnya penduduk usia produktif. Namun dilihat dari prasarat kedua, kualitas SDM Indonesia masih belum menggembirakan, meskipun Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan. Hal ini dilihat dari capaian berbagai indikator yang



merefleksikan kualitas SDM secara makro. Sebagaimana pengukuran indikator baru yang diluncurkan oleh Bank Dunia (2018) yang diberi nama *Human Capital Index* (HCI), terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang mengakumulasi sepanjang hidup manusia, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menyadari potensinya sebagai anggota masyarakat yang produktif. Berdasarkan perhitungan HCI tersebut, Indonesia tercatat pada peringkat ke-87 dari 157 negara. Dibanding Negara-negara di Asean, posisi Indonesia masih tertinggal dibanding Singapore, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Philipin, serta di atas negara Kamboja dan Mianmar. Demikian pula menurut *World Economic Forum* (WEF) yang menerbitkan index serupa dalam publikasinya "*Global Human Capital Report*" (GHCR), 2017, Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 130 negara, posisi Indonesia masih berada dibawah lima negara ASEAN yaitu Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand dan Filipina namun masih sedikit diatas tiga negara ASEAN lainnya yaitu Kamboja, Myanmar dan Laos.

Sementara itu dilihat dari prasyarat ketiga, yaitu adanya sisi kesempatan kerja yang layak dan produktif, maka gambaran permasalahan pengangguran sebagai dampak pandemic COVID-19 menunjukkan

permasalahan yang cukup kompleks. Karena, terlepas dari besarnya jumlah penganggur baru akibat pandemic COVID-19 dengan jumlah yang bervariasi, akan tetapi secara riil sebelum adanya COVID-19, penganggur di Indonesia juga menghadapi persoalan yang cukup pelik. Berdasarkan data Sakernas 2020, per Februari 2020 jumlah penganggur lama sekitar 7 juta, ditambah dengan masuknya jumlah angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja sebagai pencari kerja atau penganggur berjumlah sekitar 2,25 juta, serta terdapat pula 8,14 juta kelompok setengah penganggur dan 28,41 juta pekerja paruh waktu (BPS, 2020). Berbagai kebijakan dan program telah banyak dilakukan oleh pemerintah, dan bahkan cukup berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Demikian pula pada sector intetap berlangsung, sehingga potensi peningkatan penganggur juga masih dapat terjadi.

Prasyarat ke-empat dalam mencapai bonus demografi adalah masuknya perempuan di pasar kerja. Hadirnya pandemic COVID-19, semakin memposisikan pekerja perempuan dalam kondisi marginal. Sebagaimana dikemukakan oleh ILO (2020) bahwa pada tataran global, COVID-19 secara tidak proporsional mempengaruhi pekerja perempuan serta memperburuk ketidaksetaraan gender di pasar tenaga kerja.



Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia, terkait dengan pekerja perempuan mempunyai proporsi yang cukup besar pada sektor sektor yang terdampak COVID-19. Sektor akomodasi, makanan dan minuman, proporsi perempuan sebanyak 58,2 %; atau dari 8,5 juta atau sekitar 4,95 juta. Demikian pula pada sektor perdagangan, proporsi perempuan sebanyak 49 % dari 24,4 juta atau 12,08 juta. Untuk sektor industri pengolahan yang berjumlah 19,1 juta orang, sebanyak 43,1 %nya adalah perempuan (8,23 juta). Analisis lain yang mendukung lemahnya pekerja perempuan dilakukan oleh Setyonaluri (2020), bahwa : perempuan banyak bekerja di sektor yang terdampak COVID-19, terutama "hospitality", kesehatan, manufaktur dan perdagangan, sehingga pekerja perempuan lebih "terpukul" dengan adanya COVID-19 serta rentan kehilangan pekerjaan, karena 72 persen yang bekerja di sektor "hospitality" bekerja tanpa kontrak, serta sektor perdagangan sekitar 57 persen. Gambaran tersebut tentu belum dapat mendukung posisi pekerja perempuan untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan masuk pada pasar kerja.

Sementara prasyarat ke lima adalah meningkatnya tabungan masyarakat. Akibat pandemic COVID-19, justru meningkatkan proporsi dan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan data BPS (2020) pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 26,42 juta orang, atau meningkat 1,63 juta orang dibanding September 2019. Jika dibandingkan Maret 2019, meningkat 1,28 juta orang. (BPS,2020) Adanya pandemi menyebabkan penurunan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, di mana dampak ke masyarakat lapisan bawah lebih besar. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, maka daya beli masyarakat juga menurun. Bappenas (2020), melakukan kalkulasi bahwa akibat pandemi Corona Covis-19, daya beli masyarakat Indonesia telah hilang Rp 362 triliun. Penurunan daya beli sudah terlihat sejak wabah atau virus ini masuk di Indonesia atau pada Maret 2020. Kebijakan ini membuat daya beli masyarakat turun sehingga perekonomian di kuartal I-2020 hanya mencapai 2,97 persen. Hilangnya daya beli juga terjadi akibat tidak adanya perputaran ekonomi. Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin serta penurunan daya beli pada masa pandemic COVID-19 ini, maka secara makro, meningkatnya tabungan masyarakat belum dapat terealisasi. Akhirnya upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meraih peluang bonus demografi menjadi terdisrupsi, mengalami gangguan.

### **Pandemi COVID-19 dan Ketahanan**



## **Nasional**

Tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD RI 1945, ialah membentuk suatu "Pemerintahan Negara" yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan *kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*. Dalam rangka pencapaian Tujuan Nasional, maka diperlukan Ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamik kehidupan Nasional yang terintegrasi yang harus diwujudkan pada suatu saat, yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG). Pandemi COVID-19 sebagai bencana global telah mengusik ketahanan nasional dan merupakan gangguan, ancaman hambatan dalam mencapai tujuan nasional sekaligus merupakan tantangan yang harus diatasi bersama.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan nasional cukup signifikan, berdasarkan data yang diolah oleh Lemhanas, pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan ketahanan nasional, hal itu terukur dari perhitungan nilai Indeks Ketahanan Nasional (IKN) yang dilakukan oleh Lemhanas.

Sebelum pandemi, score IKN adalah 2,82, termasuk dalam kategori cukup Tangguh. Setelah pandemi, scorenya menurun menjadi 2,70, nilai ini termasuk dalam kategori cukup tangguh menjelang kurang tangguh (Umar Daihani, 2020). Lebih lanjut apabila dicermati masing masing gatra, menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID berpengaruh langsung pada gatra demografi, dan ekonomi. Nilai indeks gatra demografi sebelum COVID pada Desember 2019 adalah 3,27 dan setelah pandemi (Juni 2020) turun menjadi 2,63. Variabel yang terdampak dalam gatra demografi yaitu morbiditas, mortalitas, mobilitas spasial dan kesempatan kerja yang nilai indeksnya mengalami penurunan. Demikian pula pada gatra ekonomi, nilai indeks setelah pandemi (juni 2020) lebih kecil (2,65) dibanding sebelum pandemi yaitu pada Desember 2019 (2,95). Variabel ariable dalam gatra ekonomi yang nilai indeksnya turun diantaranya adalah pangan, perumahan, kemiskinan, kesempatan kerja, pemerataan, daya saing nasional, dan efisiensi pasar.

Selain berdampak pada gatra demografi dan ekonomi, pandemi COVID-19 juga berdampak pada gatra politik, ideologi, sosial budaya, gatra geografi dan SKA (sumber kekayaan alam). Hal itu mengingatkan bahwa ke delapan gatra dari ketahanan nasional



mempunyai hubungan timbal balik dan keterkaitan yang utuh secara holistik. Artinya adanya dinamika dalam salah satu atau sebagian gatra, akan memberikan efek dinamika pada gatra lainnya. Dengan demikian, ditinjau dari ketahanan nasional, penanganan kebencanaan global seperti wabah pandemik COVID-19 ini setidaknya terkait dalam aspek geostrategi dan ketahanan nasional dengan mempertimbangkan keterkaitan isu dan permasalahan kebencanaan dengan trigatra alamiah dan pancagatra dinamis.

### **SIMPULAN**

Adanya gangguan terhadap upaya upaya memetik bonus demografi yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah serta peluang mendapatkan deviden yang harusnya ada di depan mata, di tahun 2021, kian sulit diraih karena pandemi. Peluang untuk menjadi negara maju, masih tetap ada bila diikuti upaya upaya dan terobosan. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini sejalan dengan kebijakan pengendalian pandemi COVID-19 harus dilakukan secara terintegrasi dan sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lintas sektor maupun dunia usaha dan industri serta didukung oleh kesadaran dan kedisiplinan

masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Demikian pula ketahanan nasional juga mengalami dampak pandemi COVID-19, yang secara terukur terlihat dari turunnya nilai indeks ketahanan nasional (IKN). Gatra demografi dan ekonomi merupakan gatra yang terdampak langsung, namun, dampak lanjutan pada semua gatra juga cukup signifikan karena adanya keterkaitan antar gatra. Untuk itu intervensi kebijakan yang dilakukan juga lebih diprioritaskan pada gatra demografi dan ekonomi, sejalan dengan kebijakan kebijakan memanfaatkan peluang bonus demografi. Untuk gatra demografi, aspek morbiditas dan mortalitas penduduk akibat COVID-19, akan teratasi apabila kasus penderita COVID mulai menurun bahkan hilang/berakhir, sejalan dengan telah ditemukannya vaksis yang di Indonesia telah sampai pada tahap uji coba ke tiga, serta dapat diproduksi secara masal dan aman serta efektif. Demikian pula untuk gatra ekonomi, kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang dapat mengembalikan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap terbukanya kesempatan kerja, serta berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pemulihan Kembali pada gatra demografi dan ekonomi diharapkan akan memberikan efek lanjutan pada gatra





gatra lain, sehingga tercipta “kelentingan” ketahanan nasional pada posisi yang tangguh.

Pandemi COVID-19, seharusnya dapat dijadikan pelajaran berharga untuk dapat melakukan reorientasi terhadap berbagai kebijakan dan program program yang selama ini dilakukan. Misalnya kebijakan pemulihan ekonomi tetap harus memprioritaskan sektor UMKM, mengingat bahwa sector tersebut cukup adaptif dan menjadi pintu penyelamat. Di samping itu, pelajaran berharga lain adalah pentingnya mempertimbangkan *local wisdom*, merawat sumber daya alam, kembali ke jati diri bangsa, memperkuat sektor maritim termasuk pertanian yang selama ini merupakan hajat hidup orang banyak sejalan dengan penguatan struktur industri kearah memperkuat bahan baku lokal dengan memberikan nilai tambah bahan lokal, dengan demikian, terjadi kemandirian dalam hal ekonomi, pangan dan energi. Hal itu pada gilirannya juga akan berpengaruh pada kemandirian bangsa secara makro serta memperkuat ketahanan nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adi, Muhamad. 2020. Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19 Terhadap Sektor Ketenagakerjaan, Catatan Kebijakan,

The SMERU Research Institute

Badan Pusat Statistik. 2019. “Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Badan Pusat Statistik, Jakarta

Badan Pusat Statistik. 2020. “Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Badan Pusat Statistik, Jakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund, (2013), Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Jakarta

**Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**, Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund. 2018. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2020. Persentase Penduduk Miskin.

Badan Pusat Statistik. 2020. Berita Resmi Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019 No. 17/02/Th. XXIV, 5 Februari 2020.

Badan Pusat Statistik. 2020. Berita Resmi Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020.

Bloom, D., Canning, D., & Sevilla, J.



2003. The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change. Santa Monica: RAND Corporation.
- Center of Reforms on Economic (CORE), (27 April 2020) Waspada Lonjakan Pengangguran Dampak Pandemi Covid-19: Lima Rekomendasi CORE, Pers Release.
- Fukuyama, Francis. 1999. The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order, Profile Books, London
- International Labour Office (ILO). 2020. Pemantauan ILO Edisi ke-5: COVID-19 dan Dunia Kerja, ESTimasi dan Analisis Baru, International Labour Organization, Geneva.
- International IOM COVID-19 IMPACT ON KEY LOCATIONS OF INTERNAL MOBILITY BI-WEEKLY ANALYSIS 26 AUGUST 2020..**
- Kata Data Insight Center. 2020. Indeks Kerentanan Provinsi Menghadapi Covid 19 di Indonesia.
- Lemhannas RI. 2020. Bahan Ajar PPRa, PPSA dan P3DA: Geostrategi dan Ketahanan Lemhannas RI (2020), Bahan Ajar PPRa, PPSA dan P3DA: Geostrategi dan Ketahanan Nasional
- Pambudi, Agung. 2020. Strategi Dunia Usaha Menghadapi Krisis Dan Upaya Menyesuaikan Proses Bisnis Pasca Pandemi, Apindo Research Institute, disampaikan dalam Webinar SMERU Research Institute Tentang Dampak Covid -19 Terhadap Ketenagakerjaan Indonesia, **10 Juli 2020.**
- Pede, Elena. 2020. Planning for Resilience: New Paths for Managing Uncertainty, Cham, Switzerland: Springer Nature: Springer
- Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI, Pusat Penelitian & Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker dan Lembaga Demografi UI. 2020. Dampak Virus Corona Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia, Disampaikan dalam Webinar Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, 20 Mei 2020.
- Romdiati, Haning. 2020. Covid-19 Mengubah Pola Mobilitas Penduduk. Diakses pada 21 Juni 2020 dari [lipi.go.id/id/berita/53-mencatatCOVID-19/893-COVID-19-mengubah-pola-mobilitas-penduduk](http://lipi.go.id/id/berita/53-mencatatCOVID-19/893-COVID-19-mengubah-pola-mobilitas-penduduk),
- Setyonaluri, Dianhadi. 2020. Aspek Gender Dampak COVID-19: Catatan dari Hasil



- Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19, Badan Pusat Statistik, disampaikan dalam Webinar “Membedah Hasil-Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 Pengaruhnya Pada Perilaku dan Produktivitas Penduduk, 13 Juni 2020.
- Suharyadi, Asep. 2020. The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia, Working Paper. The SMERU Research Institute
- Ishihara, Ryoga, 2019, Formation and Development of “Disaster Resilience Theory” in Japan,
- SMERU, Research Institute. 2020. Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Ketenagakerjaan, Catatan Kebijakan, No.4/Juli/2020.
- Tirtosudarmo, Riwanto, (2020), Mobilitas Penduduk dan Penyebaran Covid-19.
- Twigg, John. 2007. Karakteristik Masyarakat Tahan Bencana, dialihbahasakan oleh Theresa Wuryantari, Oxfam GB dan Plan International
- Umar Daihani, Dadan,(2020), “Pelajaran Berharga dari Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Ketahanan Nasional “, Materi disampaikan dalam Webinar Lemhanas tentang “ Lanskap Geopolitik di Era COVID-19 : Memikirkan Kembali Strategi Ketahanan Nasional”,Jakarta, 19 Agustus 2020
- World Bank. 2020. Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery
- World Bank. 2020. Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1553-9. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
- World Bank. 2020. Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery
- World Bank. 2020. Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1553-9. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
- World Economic Forum. 2018. The Global Human Capital Report (2018), Diakses dari <https://weforum.org/reports/the-global-human-capital-report-2017>
- World Bank, Human Capital Index. 2018. <https://www.worldbank.org/en/publication/human>



capital dan <https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2018/10/18>

[/human-capital-index-and-components-2018](https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2018/10/18/human-capital-index-and-components-2018)